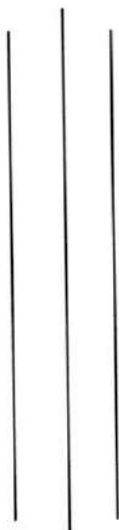




RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)**

Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. BPKD Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. BPKD terletak di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten atau lebih dikenal sebagai kompleks Pemda Klaten yang beralamatkan di Jalan Pemuda 294 Klaten.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Isu-isu strategis sebagai identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah.
2. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang masih rendah dengan ketergantungan terhadap dana dari pusat yang tinggi.

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pencatatan aset daerah belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, demikian pula untuk belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan.
4. Masih adanya kesalahan dalam penganggaran, sebagai akibat kesalahan perencanaan dan kurang akuratnya perhitungan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
5. Masih banyaknya aset tanah pemda yang belum bersertifikat.
6. Capaian realisasi anggaran (belanja daerah) belum optimal.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 BPKD Kabupaten Klaten disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada BPKD Kabupaten Klaten.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2022; dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BPKD Kabupaten Klaten.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPKD KABUPATEN KLATEN

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahunan Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 serta pencapaian terhadap target akhir pada BPKD Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

Sasaran / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome)	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10	11	12		
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	100	150	150	150
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	7.54	17.61	50.30	7.24	7.34	7.44	17.61	50.30	7.61	-65	-9	100	100	105	-885	-120
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	100	100	100	100	100
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	100	100	100	100	100
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase tanah pemkab yang	53.9	51.6	51.6	52,5	53	53,9	51.6	51.6	53,09	54,85	55	100	100	101	103	102

	bersertifikat																
	Persentase penyerapan belanja daerah	85.0	85.0	81.0	82,00	83	84	85.0	81.0	87,33	86,76	80	100	100	107	104	95

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Tujuan merupakan hasil akhir (*results*) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan kemana tujuan (*destination*) yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah **meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.**

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten Klaten adalah **meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.** Tabel Rencana Kinerja BPKD Tahun 2022 sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKD KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2022.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPKD Kabupaten Klaten beserta indikatornya sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BPKD TAHUN 2022

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	2				KEUANGAN			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adm perkantoran	%	100
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan adm keuangan	%	100
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri 12 Bulan	bulan	12
5	2	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah 75 kali	kali	75
5	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD pada PD	%	100
5	2	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Asuransi Mobil Dinas Terbayar 39 unit	Unit	39
5	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan adm umum PD	%	100
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	Jenis	7
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Atk Tersedia	Jenis	49
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Tersedia	Unit	115
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetak Dan Penggandaan	Jenis	11
5	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman Tersedia	Paket	4000
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	Kali	100
5	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan BMD yang direncanakan	%	100
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terbeli	Unit	3
5	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang PD	%	100
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Spj Terkirim	surat	900
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	Jenis	3
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Thl Administrasi Keuangan	Orang	5
5	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD yang direncanakan	%	100
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Unit	95
5	2	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler Terpelihara	Unit	50
5	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya unit gedung terpelihara dan Jumlah Arsip Tertata	Ruang	2
5	2	1	2.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	Unit	60
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	Tepat waktu/tidak tepat waktu	tepat waktu
5	2	2	2	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
5	2	2	2	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2

5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD/Unit SKPD yang diteliti	SKPD/unit SKPD	112
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD/Unit SKPD yang diteliti	SKPD	112
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Banyaknya jenis dokumen RKA SKPD 112 SKPD	SKPD/unit SKPD	112
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Banyaknya Dokumen RKAP SKPD 112 OPD	SKPD	112
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase realisasi belanja daerah	Prosentase realisasi belanja	85
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Pengelolaan Kasda	Kali	12
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Banyaknya Bendel SP2D	bendel	900
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	12
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan	Laporan	12
5	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan TPTGR	Kegiatan	12
5	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terbayarnya Gaj, TPP, TPG dan SKPP ASN	OPD	63
5	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Banyaknya Perda/Perbup Yg Tersusun	Peraturan	2
5	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan	kali	2
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran		2 bln
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Frekuensi pengelolaan	kali	12
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	1
5	2	2	2	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	1
5	2	2	2	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Banyaknya SIM Keuangan	SIM	1
5	2	2	2	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Banyaknya jenis dokumen	dokumen	2
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya bankeu, dana darurat dan bagi hasil Kabupaten Klaten	%	100
5	2	2	2	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan	Kegiatan	2
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase dana BTT yg terkelola	%	100
5	2	2	2	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi, BTT, BKK, DD, ADD	%	95
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP

5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah pemkab bersertifikat	%	54
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	Banyaknya Jenis Dokumen Standarisasi	jenis	3
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Banyaknya Jenis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	jenis	2
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Banyaknya Sppt PBB Yg Dibayar	Lembar	133
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Banyaknya SKPD pengelola barang	Kali	5
5	2	3	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Banyaknya Unit Pengelola Barang	Unit	930
5	2	3	2	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Banyaknya Unit Pengelola Barang Yg Direkonsiliasi	Unit	930
5	2	3	2	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pengelolaan pembinaan pengurus barang	orang pengurus barang	930
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	%	7
5	2	4	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan pajak daerah	kali	30
5	2	4	2	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Banyaknya Aplikasi (Sim)	Sistem	3
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan	Kegiatan	15
5	2	4	2	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi update data Wajib Pajak Daerah	Kegiatan	12
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi	kali	20
5	2	4	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Frekuensi Intensifikasi pajak daerah dan banyaknya jenis hadiah pajak daerah	Kali	18
5	2	4	2	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah, Frekuensi Penertiban Reklame 12 , 12 kegiatan, Kegiatan	kali	12
5	2	4	2	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Frekuensi Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Pemungutan Pajak Daerah	Kali	12

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Perencanaan kinerja tahunan menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Klaten, 4 Januari 2021

KEPALA BPKD KAB. KLATEN



MUH. HIMAWAN P., SSTP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19761005 199602 1 004